

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abrar, A. N. (2005). *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Al-Azhar, M. N. (2012). *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.
- Danim, S. (2002). *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Didik Sudyana (2016) *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Diandra Publisher
- Dipoyudo kirdi, 1984. *Pancasila arti dan pelaksanaannya*, Jakarta : CSIS
- Duisterwinkel, G. en Melai A.L. ed, (1972) *het wetboek van Strafvordering arnhem: S. Goouda Quint D. Brouwer en Zoon*.
- El Himam, Muhammad Neil. "Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian". Tulisan. Seminar tentang Digital Forensik, 24 Oktober 2012
- Fakhriah, E. L. (2009). *Bukti elektronik dalam pembuktian perdata*. Alumni.
- Feder, H. A. (2011). *Law 101: Legal Guide for the Forensic Expert*. (H. M. Feeder, Ed.). U.S. Department of Justice
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar

*Grafika.*

Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,. Jakarta : Gramedia, 1989

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Hari, S., & Rosita, L. (2003). Hukum Pembuktian dalam perkara pidana. *Mandar Maju, Bandung*.

Harun Hadiwijono, (1983) sari sejarah filsafat barat 2, Yogyakarta, kanisius

Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Ciputat: PT.Tatanusa.

Landsman, S. (1989). From Gilbert to Bentham: The Reconceptualization of Evidence Theory. *Wayne L. Rev.*, 36, 1149.

Manan, H. A., & SH, S. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Prenada Media.

Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

Prahara, S. (2021). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Di Tengah Konvergensi Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

Prahara, S. (2022). *Pembuktian Elektronik Dan Digital Forensik Di Indonesia*.

Prodjodikoro, W. (1967). *Hukum Atjara Pidana di Indo. Bandung: Penerbit Sumur Bandung*.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn)..

Ranoemihardja, A. (1976). *Hukum Acara Pidana*. Tarsito.

- Rothstein, P.R., Hedges, L.A., & Wiggins, D.C. 2007. *Managing Discovery of Electronic Information: A Pocket Guide for Judges*. Chicago, IL: American Bar Association.
- Schmitt, M. and Jordaan, A. 2013. Establishing the Validity of Md5 and Sha-1 Hashing in Digital Forensic Practice in Light of Recent Research Demonstrating Cryptographic Weaknesses in These Algorithms. *Digital Investigation*, 10(3).
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulianta, F. (2013). *Komputer Forensik*. Elex Media Komputindo.
- Sulianta, A. (2008). *Handphone dan perangkat keras lainnya*.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Susanto F, A. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*. Setara Press..
- Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Sutarto, E. (1999). *Efektivitas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Menegakkan Fungsi Kepabeanan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tesis, Universitas Diponegoro).
- Suyanto, S. (2018). *Pengantar Hukum Pidana. Buku Pengantar Hukum Pidana*.
- Surya Prahara, (2019). *Buku Pembuktian Elektronik dan Digital di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soesilo, *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu Dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, Jakarta, 1978.
- Syamsudin, M. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks*

Keislaman dan ke Indonesiaan. *Yogyakarta: Total Media*.

Waluyadi. (2004). Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. *Bandung: Mandar Maju*.

Weber, A. M. (2003). The council of Europe's convention on cybercrime. *Berkeley Technology Law Journal*, 18(1), 425-446.

## **B. Jurnal**

Arif, Y. C. N. (2013). Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka The Dimension Of The Change Of Law Viewed From The Perspective Of Open Legal System. *Jurnal IuS*, 1(1).

Geraldine, A. IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA. *RECIDIVE*, 10(1).

Prihmono, T., Ma'ruf, U., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 273-286. Hlm. 277

Ruci, Meiyanti, and Ismaniah. "Perkembangan Digital Forensik." *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ* 15, 2015, hlm. 232.

Ruuhwan, Ruuhwan, Imam Riadi, and Yudi Prayudi. "Analisis Kelayakan Integrated Digital Forensics Investigation Framework Untuk Investigasi Smartphone." *Jurnal Buana Informatika*, Volume 7 (4), 2016, hlm. 265-74.

Mohamed, D. (2012). Investigating cybercrimes under the Malaysian cyberlaws and the criminal procedure code: Issues and challenges. *Malayan Law Journal*, 6, 1-12.

## **C. Internet**

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Digital Forensik Dalam Kasus Pembunuhan*,  
<http://balipost.com/read/opini/2016/08/18/57582/digital-forensik-dalam-kasus-pembunuhan.html> diakses 5 Agustus 2023

Richardus Eko Indrajit, *Forensik Komputer*,  
<http://www.idsirtii.or.id/doc/IDSIRTII-Artikel-ForensikKomputer.pdf> diakses 1 Oktober 2023

Scalet, S. D. (2005). How to Keep a Digital Chain of Custody. Retrieved October 3, 2023, from <http://www.csoonline.com/article/2118807/investigations-forensics/how-to-keep-a-digitalchain-of-custody.html>

Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), Diakses pada tanggal 14 Juli 2023, Pukul 23.04 <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada 01 Agustus 2023

#### **D. Undang - Undang**

ISO/IEC 27073:2012 Tentang Information Technology Security Technology-Guidelines For Identification Collection Acquisition And Preservation Of Digital Forensic

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 Tanggal 30 Juni 2003, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang